

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat, diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian sebesar 88,23% yang berarti implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan telah memenuhi kriteria sangat sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan PP Nomor 71 Tahun 2010. Rata-rata tingkat kesesuaian tersebut diperoleh dari hasil evaluasi kelengkapan laporan keuangan sebesar 91,67% dan 84,79% dari hasil evaluasi terhadap pos-pos yang ada dalam laporan keuangan.

Dari hasil evaluasi kelengkapan laporan keuangan diperoleh persentase tingkat kesesuaian sebesar 91,67% yang artinya laporan keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 telah memenuhi kriteria sangat sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Sedangkan dari hasil evaluasi terhadap pos-pos yang ada dalam laporan keuangan diperoleh kesimpulan bahwa pengakuan, pengukuran dan penyajian pos-pos yang ada dalam laporan keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat sangat sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, dengan persentase rata-rata tingkat kesesuaian sebesar 84,79%. Rata-rata tingkat kesesuaian tersebut diperoleh dari

hasil evaluasi terhadap pos pendapatan sebesar 100%, pos belanja sebesar 85,71%, pos beban sebesar 80%, pos persediaan sebesar 81,81% dan pos aset tetap sebesar 76.47%.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai akuntansi berbasis akrual khususnya bagi staf-staf yang terkait dengan akuntansi dan penatausahaan aset. Selain itu sistem informasi yang terpisah antara keuangan dengan aset juga kurang memadai untuk mendukung terlaksananya implementasi akuntansi berbasis akrual ini, dimana sulit untuk mencocokkan catatan yang ada dibagian aset dengan catatan yang ada di bagian akuntansi dan keuangan.

5.2 Saran

Dari hasil evaluasi dan wawancara, untuk kedepannya agar implementasi akuntansi berbasis akrual terlaksana lebih optimal, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan yang lebih mendalam kepada seluruh staf yang terkait dengan akuntansi keuangan dan aset, sehingga mereka mendapatkan pemahaman dan penyamaan persepsi yang lebih baik dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
2. Disamping itu pemahaman lebih baik juga dibutuhkan oleh staf dibagian Perencanaan Program agar tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran terkait akuntansi berbasis akrual. Dimana sistem informasi untuk penganggaran sudah terintegrasi dengan sistem informasi untuk akuntansi

dan keuangan sehingga kesalahan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan di bagian program akan berakibat pada kesalahan penyajian dalam pelaporan keuangan.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebaiknya menggunakan sistem informasi akuntansi dan keuangan yang juga terintegrasi dengan sistem informasi aset, sehingga laporan yang dihasilkan lebih sinkron satu sama lainnya.

4. Dibutuhkan kepedulian semua pihak terhadap implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, sehingga setiap data yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrua lebih akurat.

